



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
website: <https://biropbj.kalteng.go.id> Pos-el ukpbj@biropbj.kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.12.10.1/04 / Bag. III / PBJ

T E N T A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun Daftar Informasi Publik yang dikuasai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi Publik (DIP) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, wajib diumumkan serta merta dan wajib disediakan setiap saat, serta informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal *26* Januari 2026

**KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,**



SUHARNO, S.T., M.Si

Lampiran Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 500.12.18.1/09/Ba.j.III/PB
Tanggal : 26 Januari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

No	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Waktu & Tempat Pembuatan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Informasi				Bentuk Informasi
					Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	Struktur Organisasi	Struktur organisasi menjelaskan susunan unit kerja dan hubungan koordinasi antarbagian dalam suatu instansi. Dokumen ini memuat pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap jabatan. Tujuannya adalah memastikan alur kerja yang jelas dan efektif. Informasi ini membantu publik memahami siapa yang berwenang dan bagaimana organisasi dijalankan.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			✓		Softcopy/ Hardcopy
2	Lingkup Kerja/Tugas Pokok dan Fungsi	Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup kerja instansi beserta tugas pokok dan fungsi setiap unit. Isinya menegaskan peran, kewenangan, serta tanggung jawab utama organisasi. Informasi ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar sesuai mandat dan tujuan.					✓		Softcopy/ Hardcopy
3	Data Pribadi ASN Biro PBJ SETDA Prov Kalteng termasuk informasi Nomor Rekening, Kondisi Keuangan, Asset, Pendapatan	Data ini berisi identitas dan informasi pribadi ASN, termasuk aspek finansial dan kepemilikan aset. Informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diakses publik untuk melindungi privasi serta keamanan ASN. Akses hanya diberikan sesuai ketentuan hukum atau kebutuhan resmi yang sah.						✓	Softcopy/ Hardcopy
4	Nama dan Profil Singkat Pejabat Struktural	Dokumen ini berisi daftar nama pejabat struktural beserta jabatan yang diemban. Profil singkat mencakup riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan tugas utama. Informasi ini membantu publik mengenal pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi organisasi.					✓		Softcopy
5	LHKPN	Menyajikan LHKPN Kepala Biro PBJ			✓				Softcopy
6	Daftar Izin dan Cuti	Memuat data izin dan cuti pegawai sesuai ketentuan kepegawaian.					✓		Softcopy
7	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	Berisi hasil penilaian kinerja pegawai sebagai dasar pembinaan karier.						✓	Softcopy
8	Daftar Urut Kepangkatan	Menampilkan urutan pangkat pegawai sesuai jenjang dan masa kerja.					✓		Softcopy/ Hardcopy
9	Informasi Kegiatan bersifat Situasional	Informasi Kegiatan bersifat Situasional					✓		Softcopy/ Hardcopy
10	Nomor Rekening, NPWP, KTP Penyedia Barang dan Jasa dalam Dokumen Pengadaan	Data identitas dan finansial penyedia, bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan resmi.						✓	Softcopy/ Hardcopy
11	LKIP, LRA, Renja, Renstra, Neraca, CALK, Laporan Realisasi	LKIP, LRA, Renja, Renstra, Neraca, CALK, Laporan Realisasi, yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa			✓				Softcopy/ Hardcopy
12	Daftar Inventaris	Mencatat aset dan barang milik instansi untuk pengelolaan dan pengawasan.			✓				Softcopy/ Hardcopy
13	Kebijakan daerah terkait pembinaan SDM pengadaan barang/jasa	Dokumen kebijakan resmi untuk peningkatan kapasitas SDM pengadaan.			✓				Softcopy/ Hardcopy
14	Data kelembagaan pengadaan barang/jasa	Informasi struktur, fungsi, dan peran kelembagaan pengadaan di daerah.					✓		Softcopy/ Hardcopy
15	Roadmap tingkat kematangan organisasi pengadaan barang/jasa	Rencana bertahap menuju peningkatan kualitas dan profesionalisme UKPBJ, dalam rangka menuju UKPBJ sebagai Center Of Excellence.			✓				Softcopy/ Hardcopy

No	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Waktu & Tempat Pembuatan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Informasi				Bentuk Informasi
					Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
16	Materi pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa	Kumpulan bahan ajar dan panduan untuk mendukung pelatihan pengadaan.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			✓		Softcopy/ Hardcopy
17	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pembinaan SDM dan kelembagaan	Dokumen evaluasi atas pelaksanaan pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan.			✓				Softcopy/ Hardcopy
18	Dokumen manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa	Berisi kumpulan praktik, referensi, dan pengalaman untuk pengelolaan pengetahuan PBJ.					✓		Softcopy/ Hardcopy
19	Laporan kegiatan Subbagian (Pembinaan SDM, Kelembagaan, Pendampingan/ Konsultasi/Bimtek)	Laporan kegiatan Subbagian (Pembinaan SDM, Kelembagaan, Pendampingan/ Konsultasi/Bimtek).			✓				Softcopy/ Hardcopy
20	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.			✓				Softcopy
21	Pengumuman Tender	Pengumuman Tender					✓		Softcopy
22	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Tender/Seleksi	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Tender/Seleksi					✓		Softcopy
23	Nilai Pagu dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Tender/Seleksi	Nilai Pagu dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Tender/Seleksi					✓		Softcopy
24	Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender/Seleksi Paket Selesai	Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender/Seleksi Paket Selesai					✓		Softcopy
25	Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender/Seleksi Paket Sedang Berjalan	Hasil Evaluasi Pemilihan Penyedia Tender/Seleksi Paket Sedang Berjalan						✓	Softcopy/ Hardcopy
26	Pengumuman Pemenang Tender/Seleksi	Pengumuman Pemenang Tender/Seleksi					✓		Softcopy
27	Tata Cara Pendaftaran Penyedia dan Tata Cara Pengajuan Perubahan Data Penyedia	Tata Cara Pendaftaran Penyedia dan Tata Cara Pengajuan Perubahan Data Penyedia					✓		Softcopy/ Hardcopy
28	Standard Operational Procedure (SOP) Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Standard Operational Procedure (SOP) Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa					✓		Softcopy/ Hardcopy
29	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro PBJ	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PBJ.			✓				Softcopy/ Hardcopy
30	Dashboard Profile Pengadaan	Dashboard Profile Pengadaan			✓				Softcopy/ Hardcopy
31	Statistik Pelayanan Helpdesk Online	Statistik Pelayanan Helpdesk Online			✓				Softcopy/ Hardcopy
32	Regulasi PBJ yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Regulasi PBJ yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah					✓		Softcopy/ Hardcopy
33	Dokumen pemenuhan kematangan UKPBJ Provinsi Kalimantan Tengah	Bukti capaian tingkat kematangan UKPBJ sesuai standar nasional.					✓		Softcopy/ Hardcopy
34	Dokumentasi Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang dipublikasikan	Dokumentasi Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang dipublikasikan, berupa kumpulan foto, video, dan laporan kegiatan yang dipublikasikan untuk umum.					✓		Softcopy/ Hardcopy

